

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris dengan iklim tropis dan tanah subur memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian.<sup>1</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,87 persen (*year-on-year*), dengan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen.<sup>2</sup> Sejalan dengan kondisi tersebut, Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah dengan basis ekonomi agraris turut menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi tahun 2025, struktur perekonomian daerah pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang lebih dari sepertiga total PDRB, yaitu sebesar 33–34 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Jambi masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai basis utama penggerak ekonomi daerah.<sup>3</sup>

Sektor pertanian terdiri atas subsektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, serta kehutanan. Di antara subsektor tersebut, tanaman pangan dan hortikultura memiliki nilai ekonomi tinggi dan prospek

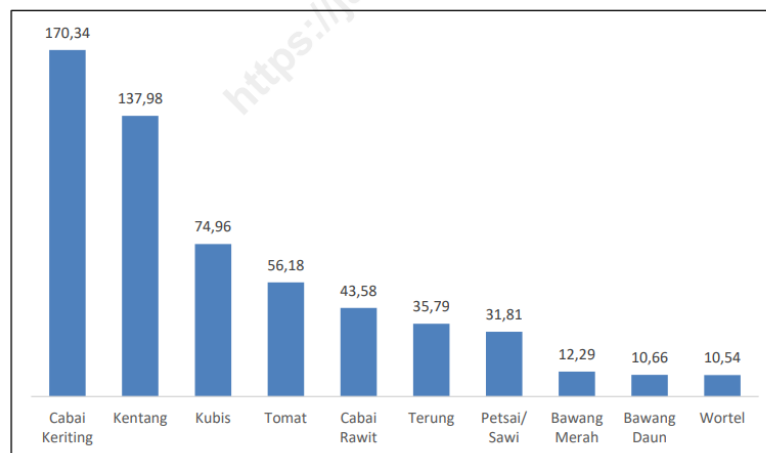
---

<sup>1</sup> Geraldo Manaroinsong, Masje Silija Pangkey, and Rully Mambo, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modoinding," *Jurnal Administrasi Publik* IX, no. 3 (2023): 223–35.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Nasional, 2025

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, "Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan II-2024," 2024.

pengembangan yang kuat.<sup>4</sup> Komoditas hortikultura mencakup pengelolaan buah, sayuran, tanaman obat, dan florikultura.<sup>5</sup> Kelompok komoditas tersebut memiliki peluang pasar yang besar dengan tingkat produksi yang relatif tinggi. Salah satu komoditas hortikultura yang paling bernilai adalah cabai, dimana tanaman tersebut berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan domestik, industri pangan, maupun ekspor, terutama melalui tiga kelompok konsumsi utamanya: cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit.<sup>6</sup>



**Gambar 1.1. Komoditas Sayuran dengan Produksi Terbesar di Provinsi Jambi (ribu ton), Tahun 2024**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Komoditas sayuran dengan produksi terbesar di Provinsi Jambi pada tahun 2024 didominasi oleh cabai keriting atau juga dikenal dengan cabai merah dengan total produksi mencapai 170,34 ribu ton. Posisi selanjutnya ditempati oleh kentang sebesar 137,98 ribu ton, diikuti kubis sebanyak 74,96 ribu ton, serta tomat dan cabai rawit masing-masing sebesar 56,18 ribu ton dan 43,58 ribu ton. Sementara itu,

<sup>4</sup> Mauwlna Syukron, "Analisis Value Chain Komoditas Cabai (Studi Kasus Kecamatan Kumpeh Di Kabupaten Muaro Jambi)" (Universitas Jambi, 2023).

<sup>5</sup> Permentan Nomor 46 Tahun 2019, pasal 1.

<sup>6</sup> Syukron, *Op. Cit.*

produksi komoditas lain seperti terong (35,79 ribu ton), petsai/sawi (31,81 ribu ton), bawang merah (12,29 ribu ton), bawang daun (10,66 ribu ton), dan wortel (10,54 ribu ton) menunjukkan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan lima komoditas utama.<sup>7</sup> Data tersebut mendukung fakta bahwa provinsi tersebut merupakan salah satu dari sepuluh provinsi penghasil cabai merah terbesar di Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini.

**Tabel 1.1. Jumlah Produksi Cabai Merah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2023**

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Panen (Ha)</b>	<b>Produksi (Kuintal)</b>
Kabupaten Kerinci	5.850,20	1.482.393,79
Kabupaten Merangin	877,50	60.660,60
Kabupaten Sarolangun	61,96	3.628,25
Kabupaten Batang Hari	111,00	8.000,00
<b>Kabupaten Muaro Jambi</b>	<b>338,70</b>	<b>9.482,00</b>
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	107,00	3.350,50
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	67,00	2.125,00
Kabupaten Tebo	80,40	2.192,55
Kabupaten Bungo	65,00	3.380,00
Kota Jambi	17,69	584,14
Kota Sungai Penuh	95,47	2.757,40
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>7.672,42</b>	<b>1.578.564,54</b>

*Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun, 2024*

Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi (2024), Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah dengan produksi cabai merah yang cukup tinggi di Provinsi Jambi, yakni mencapai 9.482 kuintal dengan luas panen 338,70 hektar dan produktivitas 28,00 kuintal per hektar. Berdasarkan tingkat produksinya, Muaro Jambi menempati urutan keempat setelah Kabupaten Kerinci (1.482.393,79 kuintal), Batanghari (80.000 kuintal), dan

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, "Produksi Sayuran Dan Buah-Buahan Provinsi Jambi 2024," 2025, hlm 9.

Merangin (60.660,60 kuintal). Posisi tersebut menunjukkan bahwa Muaro Jambi memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan cabai di Provinsi Jambi serta potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi cabai unggulan, mengingat karakteristik wilayah dan dukungan kebijakan yang kondusif bagi penguatan sektor hortikultura.<sup>8</sup>

**Tabel 1.2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai Merah Menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Mestong	12	54,0	4,5
2	Sungai Bahar	5	35,5	7,1
3	Bahar Selatan	2	12,9	6,45
4	Bahar Utara	6	52,8	8,8
5	Kumpeh Ulu	26	293,3	11,28
6	Sungai Gelam	35	385,5	11,01
<b>7</b>	<b>Kumpeh</b>	<b>118</b>	<b>1.111,8</b>	<b>9,42</b>
8	Maro Sebo	25	147,1	5,88
9	Taman Rajo	6	44,9	7,48
10	Jambi Luar Kota	22	54,7	2,48
11	Sekernan	5	30,4	7,30
	<b>Jumlah</b>	<b>262</b>	<b>2.302,7</b>	<b>8,82</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2023*

Kecamatan Kumpeh sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 1.658,93 km<sup>2</sup> merupakan daerah dengan produksi cabai merah tertinggi, yaitu sebesar 1.111,8 ton dengan luas panen 118 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa Kumpeh memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi cabai merah, yakni hampir setengah dari total produksi kabupaten. Meskipun produktivitasnya (9,42 ton/ha) lebih rendah dibanding Kumpeh Ulu

<sup>8</sup> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi 2021-2026.

(11,28 ton/ha) dan Sungai Gelam (11,01 ton/ha), luas panen yang dominan menjadikan Kumpeh sebagai sentra utama cabai merah di wilayah tersebut.<sup>9</sup>

**Tabel 1.3. Luas Panen Produksi dan Produktivitas Cabai Merah Menurut Desa di Kecamatan Kumpeh Tahun 2022**

No	Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Puding	0,5	6	12,00
2	<b>Maju Jaya</b>	<b>109,99</b>	<b>1319,8</b>	<b>11,99</b>
3	<b>Mekar Sari</b>	<b>79,95</b>	<b>959,4</b>	<b>12,00</b>
4	Pulau Mentaro	10	120	12,00
5	Betung	2	24	12,00
6	Pematang Raman	5	60	12,00
7	Petanang	5	30	6,00
8	Sungai Bungur	2	24	12,00
9	Sepojon	1	12	12,00
10	Sogo	0,5	6	12,00
11	Tanjung	1,5	18	12,00
12	Gedong Karya	3	36	12,00
13	Jebus	5	60	12,00
14	Sungai Aur	5	60	12,00
15	Rantau Panjang	5	60	12,00
16	Londerang	5	60	12,00
17	Rondang	1	12	12,00

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2023*

Produksi dan luas panen cabai terbesar di Kecamatan Kumpeh terdapat di Desa Maju Jaya dengan luas panen mencapai 109,99 hektar dan produksi sebesar 1.319,8 ton, serta Desa Mekar Sari dengan luas panen 79,95 hektar dan produksi 959,4 ton. Kedua desa tersebut menjadi sentra utama produksi cabai di Kecamatan Kumpeh karena memiliki lahan yang luas dan produktivitas tinggi.<sup>10</sup> Perkembangan kedua desa ini juga tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa Desa Mekar Sari dahulu berkembang dari program transmigrasi berupa Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), sedangkan Desa Maju Jaya merupakan hasil pemekaran dari desa tersebut

<sup>9</sup> *Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Kumpeh dalam Angka Tahun 2023.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

pada tahun 2009 yang kemudian tumbuh menjadi kawasan dengan aktivitas pertanian yang intensif.<sup>11</sup>

**Tabel 1.4. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Cabai Merah Di Kecamatan Kumpeh Periode 2016–2020**

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2016	129	479,0	3,71
2	2017	145	476,5	3,28
3	2018	272	3.775,9	13,9
4	2019	112	676,4	6,03
5	2020	118	1.111,8	9,42
	<b>Rata-rata</b>	<b>155,2</b>	<b>1.303,9</b>	<b>8,41</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Meskipun merupakan kawasan sentra penghasil cabai di Kabupaten Muaro Jambi, dinamika pengelolaan produksi cabai di Kecamatan Kumpeh masih dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas hasil panen dari waktu ke waktu. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas cabai merah di Kecamatan Kumpeh selama periode 2016–2020 terlihat berfluktuasi cukup tajam. Contohnya, seperti kenaikan produktivitas pada 2017 dari 476,5 ton/Ha ke 3.775,9 ton/Ha. Kemudian, tahun 2018 sebagai tahun yang mencatat produksi tertinggi sebesar 3.775,9 ton, namun capaian tersebut tidak berlanjut pada tahun berikutnya yang justru mengalami penurunan signifikan.<sup>12</sup> Dinamika tersebut kemudian menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian dalam menjaga stabilitas proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh.

Dalam bidang pertanian, proses produksi dipahami sebagai rangkaian tahapan yang dilakukan untuk mengubah berbagai input, seperti sumber daya alam,

<sup>11</sup> Sistem Informasi Desa Maju Jaya Kecamatan Kumpeh

<sup>12</sup> *Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Kumpeh dalam Angka Tahun 2023.*

tenaga kerja, modal, dan teknologi, menjadi output berupa hasil pertanian.<sup>13</sup> Proses produksi tanaman pada umumnya mengacu pada petunjuk teknis budidaya yang mencakup tahap pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga pemanenan. Keberhasilan pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dan akses petani terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi pertanian (saprodi), serta infrastruktur penunjang, seperti Jalan Usaha Tani (JUT) dan irigasi yang menunjang kelancaran proses produksi.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal, petani cabai masih dihadapkan pada berbagai risiko produksi, seperti ancaman banjir tahunan, keterbatasan modal usaha, serta kerentanan tanaman terhadap serangan hama penyakit. Selain itu, ketidakstabilan harga akibat fluktuasi pasar dan tekanan inflasi juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi petani, terutama ketika harga cabai mengalami penurunan pada saat panen.

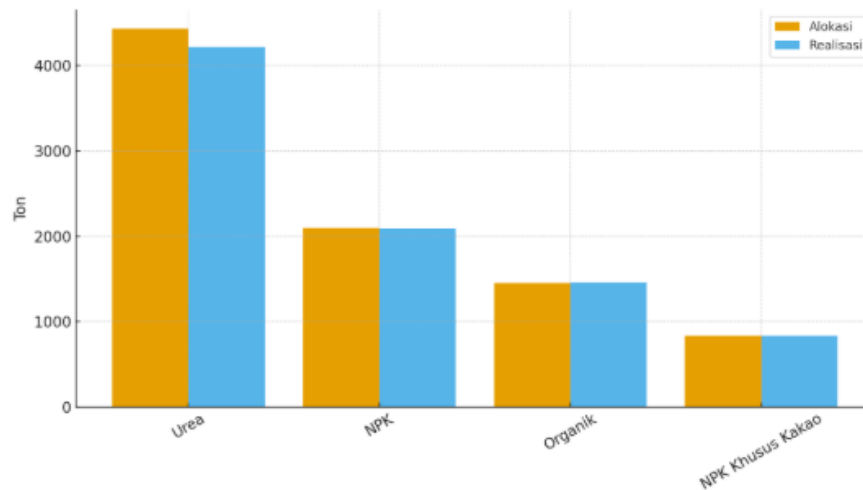
Permasalahan internal dari petani yang menghambat proses produksi komoditas cabai, yaitu terkait permodalan yang masih kurang memadai. Desa Maju Jaya sebagai sentra produksi cabai dan Desa Mekar Sari dengan komoditas cabai yang tinggi di Kecamatan Kumpeh seharusnya menjadi penerima manfaat bantuan dari pemerintah. Berdasarkan Permentan Nomor 03 Tahun 2024, komoditas hortikultura menjadi komoditas yang berhak menerima bantuan, baik saprodi maupun alsintan. Meskipun demikian, realitanya di kedua desa tersebut, petani setempat menyampaikan bahwa mereka sudah tidak lagi menerima pupuk subsidi

---

<sup>13</sup> Nindy Sevirasari, Cahyo Adileksana, and Ananta Bayu Pratama, *Modul Pembelajaran Praktik Pertanian Terbaik Budi Daya Cabai Merah* (Jakarta Selatan: Yayasan Edufarmers International, 2023), hlm 2.

<sup>14</sup> Sheyoputri, et al., *Op. Cit.*, hlm 35.

secara rutin. Distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya pernah ada tidak berkesinambungan, bahkan dalam tiga tahun terakhir sama sekali tidak diterima.



**Gambar 1.2. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024**

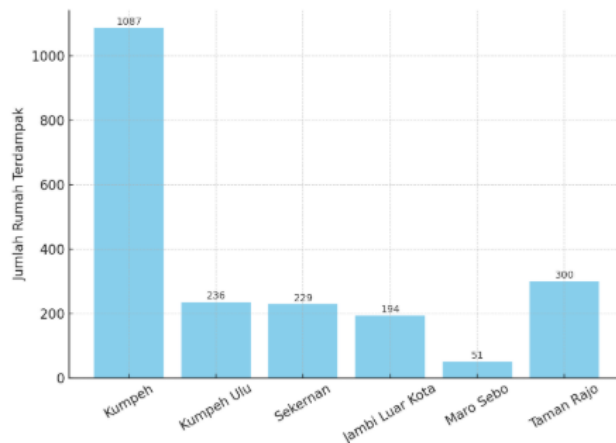
*Sumber: PPID Provinsi Jambi, 2024*

Di sisi lain, kondisi ini berbanding terbalik dengan data penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten. Pada tahun 2024, Kabupaten Muaro Jambi justru mencatat realisasi penyaluran pupuk hingga 7.937,10 ton atau mencapai 100,16% dari alokasi yang ditetapkan. Bahkan pada beberapa jenis pupuk seperti pupuk organik, tingkat serapannya melampaui alokasi.<sup>15</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa secara administratif, distribusi pupuk bersubsidi sebenarnya berjalan normal di kabupaten, namun tidak sepenuhnya sampai ke petani di Kecamatan Kumpeh. Ketidaksinkronan antara data realisasi dan pernyataan petani di lapangan mengindikasikan adanya persoalan pada rantai distribusi pupuk.

---

<sup>15</sup> Laporan alokasi dan realisasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jambi untuk tahun 2024 yang dirilis oleh PPID Provinsi Jambi.

Selain pupuk, persoalan permodalan juga berkaitan dengan kebutuhan saproodi lain, seperti benih dan obat-obatan untuk pengendalian hama penyakit tanaman (HPT). Dalam keterangannya pada observasi di awal, petani juga tidak lagi secara rutin mendapatkan bantuan baik berupa benih maupun obat-obatan untuk pengendalian hama penyakit tanaman. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan dalam proses distribusi sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, yaitu di sini berupa bantuan saproodi sebagai faktor yang digantungkan petani dalam kelancaran proses produksi komoditas cabai.

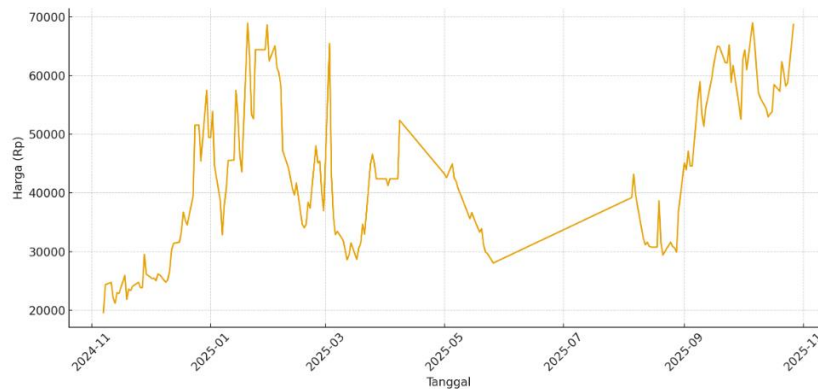


**Gambar 1.3. Jumlah Desa Terdampak dan Rumah Tenggelam akibat Banjir di Kecamatan Kumpeh**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, 2019-2024*

Selain persoalan internal berupa permodalan, kondisi alam juga menjadi tantangan tersendiri bagi petani Kumpeh. Posisi wilayah yang berada di antara Sungai Batanghari dan Sungai Kumpeh menjadikan Kecamatan Kumpeh rawan genangan musiman, termasuk pada Desa Maju Jaya dan Desa Mekarsari. Pada tahun 2024, BPBD Kabupaten Muaro Jambi mencatat 74 desa dan 2.097 rumah terdampak banjir, dengan Kumpeh sebagai wilayah paling parah, yaitu mencapai

17 desa dan 1.087 rumah terendam.<sup>16</sup> Data BPS 2019–2024 juga menunjukkan bahwa hampir seluruh desa di Kumpeh mengalami banjir tahunan.<sup>17</sup> Kondisi ini meningkatkan kerentanan tanaman cabai terhadap kerusakan serta memperbesar potensi kehilangan hasil.<sup>18</sup>



**Gambar 1.4. Pergerakan Harga Cabai Merah di Pasar Tradisional Provinsi Jambi (2024-2025)**

*Sumber: Panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2025*

Selanjutnya, produksi cabai di Kecamatan Kumpeh juga menghadapi tantangan dari dinamika harga dan kestabilan produksi. Cabai merah merupakan komoditas hortikultura dengan nilai jual tinggi sekaligus penyumbang inflasi nasional setiap tahunnya.<sup>19</sup> Kontribusi cabai terhadap inflasi tercermin dari fluktuasi harganya yang tinggi akibat ketidakstabilan produksi, kendala pascapanen

<sup>16</sup> “Data BPBD Kabupaten Muaro Jambi Hingga Saat Ini Sebanyak 2.079 Rumah Terendam Banjir,” *jambi24jam.com*, 2024, [https://www.jambi24jam.com/2024/01/data-bpbd-kabupaten-muaro-jambi-hingga.html#google\\_vignette](https://www.jambi24jam.com/2024/01/data-bpbd-kabupaten-muaro-jambi-hingga.html#google_vignette).

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik, 2019-2023

<sup>18</sup> Nafa Azzahra, “Hubungan Perilaku Petani Dengan Produktifitas Usahatani Cabai Merah Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi,” *Skripsi Universitas Jambi*, 2025, 6, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/74738>.

<sup>19</sup> Oksa Camila Cierdipa, “Analisis Pendapatan Usahatani Cabai Merah Periode Puncak Inflasi Di Kabupaten Muaro Jambi,” *Skripsi Universitas Jambi*, 2022, 1–12, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/58396>.

dan penyimpanan, serta surplus produksi yang tidak berlangsung sepanjang tahun.<sup>20</sup> Data terbaru dari Panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) menunjukkan bahwa harga cabai merah di Provinsi Jambi masih berada pada tren peningkatan dengan harga harian cabai merah mencapai Rp68.700/kg, naik Rp9.950 dari sebelumnya dan meningkat dari Rp59.400/kg pada sebulan terakhir. Bahkan dalam tiga bulan, kenaikannya mencapai 118,79 persen dari posisi awal Rp31.400/kg.<sup>21</sup> Lonjakan ini perlu diperhatikan sebab fluktuasi harga menjadi ancaman inflasi daerah yang dapat memengaruhi kestabilan pasokan cabai.

Permasalahan proses produksi komoditas cabai kemudian menunjukkan perlunya pengelolaan terutama dalam memastikan ketersediaan sarana prasarana proses produksinya. Dalam skala nasional, bentuk dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan bidang pertanian termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020, meliputi pemberian penghargaan, beasiswa, bantuan operasional, bantuan sarana prasarana, serta bantuan rehabilitasi dan pembangunan.<sup>22</sup> Selanjutnya, penyediaan sarana prasarana pertanian ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 bahwa susunan organisasi kementerian meliputi Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyediaan alat mesin pertanian, pupuk, perstisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian.<sup>23</sup> Dalam kerangka

---

<sup>20</sup> Dara Latifa, Faidil Tanjung, and Dwi Yuzaria, "Analisis Daya Saing Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Cabai Merah Keriting Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia," *Agro Bali : Agricultural Journal* 4, no. 3 (2021): 447, <https://doi.org/10.37637/ab.v4i3.741>.

<sup>21</sup> Agus Dwi Darmawan, "Harga Cabai Merah Di Pasar Tradisional Provinsi Jambi Sebulan Terakhir Naik 15,66%," *databoks*, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/>.

<sup>22</sup> Kementerian Pertanian. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020*, pasal 4.

<sup>23</sup> Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024*, pasal 16.

kebijakan tersebut, pemerintah menempatkan diri sebagai aktor utama penyedia sumber daya, dengan petani sebagai kelompok sasaran penerima manfaat.

Pada tingkat daerah, mandat tersebut diterapkan melalui Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021-2026. Meskipun belum terdapat kebijakan yang spesifik mengatur pengelolaan proses produksi cabai, secara umum program tersebut terdiri atas: program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten; penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian; pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; serta penyuluhan pertanian. Secara keseluruhan, program tersebut memperlihatkan keberadaan pemerintah sebagai aktor kunci yang dibantu penyuluh pertanian (PPL) dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, rangkaian program dalam Renstra DTPH tersebut menjadi kerangka kebijakan daerah yang mendasari pengelolaan komoditas pertanian, termasuk cabai. Implementasi kebijakan ini mencakup pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644 Tahun 2024 yang menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton pada tahun 2025, sekaligus mengatur mekanisme penyalurannya.<sup>24</sup> Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas produktivitas juga sempat terlihat melalui kebijakan intervensi “Gerakan Membeli Cabai” pada Oktober 2024 dengan membeli langsung hasil panen petani guna mencegah

---

<sup>24</sup> Ali Ahmad, “Pupuk Bersubsidi 2025 Siap Disalurkan Mulai 1 Januari, Ini Mekanisme Dan Syaratnya,” *jambione.com*, 2024, <https://www.jambione.com/news/1365476667/pupuk-bersubsidi-2025-siap-disalurkan-mulai-1-januari-ini-mekanisme-dan-syaratnya>.

kerugian saat harga anjlok.<sup>25</sup> Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab aktor otoritas dalam menjamin agar proses produksi di tingkat petani tidak terhenti akibat kerugian modal.

Meskipun secara normatif pemerintah telah memiliki kerangka kerja yang relatif sistematis, pada praktiknya kerangka tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh. Ketiadaan program yang secara spesifik diarahkan pada pengembangan komoditas cabai menyebabkan proses produksi komoditas unggulan ini berjalan tanpa kepastian dukungan bantuan yang jelas. Sebagai aktor kunci, pemerintah memiliki otoritas untuk menjamin bantuan menjangkau petani sasaran, mengingat adanya hubungan saling ketergantungan di mana petani memiliki keterbatasan modal, sementara pemerintah bergantung pada hasil produksi petani untuk stabilitas pasokan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, kedua desa lokasi penelitian justru menerima bantuan sarana produksi hingga alat dan mesin pertanian dari Bank Indonesia (BI). Menurut keterangan petani, kontribusi BI dirasakan lebih nyata dibandingkan pemerintah daerah, karena penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada petani melalui kelompok tani. Bantuan tersebut mencakup alsintan yang selama ini relatif sulit diakses dari pemerintah, serta dukungan saprodi, seperti pupuk dan obat-obatan. Keterlibatan BI sendiri tidak terlepas dari perannya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi,

---

<sup>25</sup> Benny Wijaya, "Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Gelar Program Pembelian Cabai Untuk Bantu Petani," rri.co.id, 2024, <https://rri.co.id/daerah/1071407/pemerintah-kabupaten-muaro-jambi-gelar-program-pembelian-cabai-untuk-bantu-petani>.

di mana komoditas cabai merupakan salah satu komoditas yang kerap memicu gejolak harga. Dengan demikian, BI berkepentingan untuk memastikan kelancaran proses produksi agar pasokan cabai tetap terjaga, sementara petani membutuhkan dukungan BI untuk mengatasi keterbatasan sumber daya.

Munculnya aktor non-pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh melibatkan aktor selain pemerintah. Namun, keterlibatan BI yang berjalan secara langsung tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dengan dinas terkait mengindikasikan adanya kelemahan dalam membentuk suatu relasi atau jaringan. Kondisi tersebut kemudian memicu pergeseran pola hubungan di lapangan. Pasifnya peran otoritas daerah dalam menyuplai kebutuhan vital petani menyebabkan para petani secara pragmatis mengalihkan ketergantungan mereka kepada Bank Indonesia yang dinilai lebih responsif dalam memberikan dukungan teknologi dan kepastian input produksi. Fenomena 'saling butuh' yang tidak terkelola dengan baik ini mencerminkan adanya persoalan dalam keseimbangan peran dan pertukaran sumber daya antar-aktor yang terlibat.

Dalam menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori *network governance* yang dikemukakan oleh Klijn dan Koppenjan (1999) untuk memahami bagaimana proses produksi komoditas cabai dijalankan melalui keterlibatan serta hubungan antar berbagai aktor yang saling terhubung. Analisis difokuskan pada dimensi *actor, interdependency, and frames* guna melihat bagaimana hubungan saling ketergantungan antara pemerintah, petani, dan aktor non-pemerintah terbentuk dan dijalankan dalam menghadapi berbagai persoalan

produksi di tingkat lokal. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana pola ketergantungan antaraktor berkontribusi terhadap kelancaran proses produksi, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul akibat ketidakseimbangan peran, sumber daya, maupun lemahnya koordinasi dalam jaringan aktor yang ada.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji *network governance* dalam berbagai konteks kebijakan publik. Devi et al. (2025) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan keterlibatan aktor kunci dapat menghambat efektivitas program tanggap darurat bencana, meskipun telah ditopang regulasi yang kuat.<sup>26</sup> Sementara itu, Khalishaa et al. (2025) menyoroti peran *network governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan temuan bahwa minimnya partisipasi dan inovasi menjadi penghambat utama jaringan aktor.<sup>27</sup> Pada sektor pertanian, Hijri et al. (2021) menemukan bahwa tata kelola jaringan antarinstansi dalam merespons alih fungsi lahan relatif berjalan baik, namun masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas dan kualitas output kebijakan.<sup>28</sup>

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada implementasi program atau kebijakan di tingkat makro, sementara kajian yang secara spesifik menelaah interdependensi antaraktor dalam proses produksi komoditas pertanian di tingkat lokal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini

---

<sup>26</sup> Sry Devi, Laode Asrun Azis R, and Isra Djabbar, "Network Governance Pada Program Tagana Masuk Sekolah Dalam Menghadapi Bencana Alam Di Kabupaten Kolaka," *Pena Bangsa: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif* 1, no. 1 (2025): 14–27, <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.257>.

<sup>27</sup> Nadhira Ghinaa Khalishaa et al., "Peran Network Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Beerbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 8 (2025).

<sup>28</sup> Yana Syafieyana Hijri et al., "Network Govenance Dalam Pemenuhan Ketrersediaan Pangan Di Kota Malang," *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram* 7, no. 2 (2021): 207–29.

mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana hubungan saling ketergantungan antaraktor terbentuk dan memengaruhi proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh melalui judul **“Interdependensi Aktor dalam Proses Produksi Komoditas Cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditemukan beberapa masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Meskipun memiliki potensi besar sebagai sentra hortikultura, namun belum adanya program khusus pengelolaan komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh mengakibatkan ketiadaan acuan regulasi yang spesifik untuk menjamin keberlanjutan dukungan sumber daya dari pemerintah daerah.
2. Terjadinya ketimpangan antara data administratif Kabupaten terkait penyaluran pupuk bersubsidi dengan fakta di lapangan, yang mengakibatkan terhambatnya aliran bantuan dari aktor otoritas ke aktor pelaksana (petani).
3. Belum terbangunnya mekanisme pertukaran sumber daya informasi dan teknis yang fungsional dalam menghadapi kompleksitas bencana banjir tahunan, sehingga petani masih menanggung risiko kegagalan produksi secara mandiri.
4. Terjadinya pergeseran pola interdependensi di mana petani cenderung menggantungkan keberlanjutan produksinya pada intervensi Bank Indonesia akibat minimnya dampak kehadiran dan peran aktor otoritas daerah (DTPHP) dalam proses produksi *on-farm*.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana interdependensi antaraktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat jalannya interdependensi aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pola interdependensi antar-aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat jalannya interdependensi aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait penerapan pendekatan *network governance* dalam sektor pertanian pada tahap hulu atau proses produksi komoditas.
2. Memperkaya literatur mengenai dimensi interdependensi aktor dalam kerangka teori *network governance*, dengan menunjukkan

bagaimana ketergantungan antaraktor memengaruhi keberlangsungan proses produksi komoditas cabai di tingkat lokal.

3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji interdependensi aktor, relasi aktor, maupun *network governance* dalam pengembangan sektor pertanian atau komoditas lainnya.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi dan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi jaringan antaraktor dalam proses produksi cabai, sehingga dapat menjadi dasar dalam memperkuat koordinasi dan sinergi lintas aktor.
2. Bagi kelompok tani, pemerintah desa, serta aktor pendukung lainnya, penelitian ini dapat membantu memahami posisi, ketergantungan, dan hambatan yang muncul dalam proses produksi cabai, sehingga mendorong terbentuknya kerja sama yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Bagi pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang dukungan kebijakan, program, maupun fasilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata dalam proses produksi komoditas cabai.

## **1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berusaha menganalisis fenomena pengelolaan proses produksi pertanian dalam studi jaringan aktor. *Network governance* sendiri telah lama menjadi topik yang dibahas dalam berbagai penelitian. Salah satunya yang dikaji oleh Khalishaa, et al. (2025) dengan judul “Peran *Network Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang.” Melalui analisis dari teori Kinji dan Koppejan, hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penghambat pengembangan kawasan tersebut disebabkan oleh minimnya partisipasi generasi muda dan kurangnya promosi yang inovatif. Maka dari itu, perlu adanya *network governance* sebagai strategi pengelolaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.<sup>29</sup> Penelitian tersebut menjadi referensi untuk penelitian ini dalam memahami peran interaksi, interdependensi, dan koordinasi antaraktor dalam mendukung keberhasilan pengelolaan proses produksi, meskipun berada pada sektor dan konteks kebijakan yang berbeda.

Selanjutnya kajian *network governance* dengan teori yang sama juga dikupas melalui penelitian berjudul “*Network Governance* dalam Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta berbasis Kabupaten/kota di Kota Pekanbaru” oleh Aritonang (2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola jaringan dalam layanan tuberkulosis telah berjalan cukup baik, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan

---

<sup>29</sup> Khalishaa et al., *Loc. Cit.*

rendahnya intensitas interaksi antaraktor.<sup>30</sup> Meskipun berada pada sektor kesehatan, penelitian tersebut menjadi rujukan yang relevan untuk penelitian ini, khususnya dalam melihat pola interdependensi, peran aktor, serta hambatan jaringan lintas sektor di tingkat lokal.

Selanjutnya, penelitian oleh Oktapiani, et al. (2024) dalam “*Network Governance* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Terowongan Pejalan Kaki Terminal Intermoda Joyoboyo – Kebun Bintang Surabaya” menggunakan teori Provan dan Kenis (2008) dengan menitikberatkan pada jumlah aktor yang terlibat, pembagian kewenangan antaraktor, serta kesesuaian tujuan dalam jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran, mekanisme koordinasi, serta komunikasi yang terbangun antaraktor.<sup>31</sup> Penelitian tersebut menjadi referensi bagi penelitian ini dalam memahami bagaimana pembagian kewenangan dan keterhubungan antaraktor dalam suatu jaringan memengaruhi kelancaran proses kebijakan.

Kemudian, dengan karakteristik lokus yang sama dengan Kecamatan Kumpeh, yaitu daerah rawan banjir, penelitian oleh Devi, et al. (2025) dengan judul “*Network Governance* pada Program Tagana Masuk Sekolah dalam Menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Kolaka” dengan menggunakan kerangka analisis Klijn dan Koppejan (2016), penelitian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan aktor kunci dapat menghambat

---

<sup>30</sup> Yani Roslani br. Aritonang, “Network Governance Dalam Layanan Tuberkulosis Di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten / Kota Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 360–69.

<sup>31</sup> Riska Oktapiani, Yusuf Hariyoko, and Eddy Wahyudi, “Network Governancce Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan Terowongan Pejalan Kaki Terminal Intermoda Joyoboyo - Kebun Binatang Surabaya,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 04 (2024): 245–49.

keberhasilan implementasi kebijakan tanggap darurat bencana, meskipun telah didukung regulasi yang kuat.<sup>32</sup> Benang merah penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sebagai rujukan yang analitis dalam memahami dinamika jaringan aktor utamanya dalam melihat bagaimana interdependensi, koordinasi, dan hambatan jaringan memengaruhi jalannya pelaksanaan program di daerah rawan banjir.

Penelitian Rossilawati, Hanani, dan Kismartini (2024) membahas penerapan *network governance* dalam peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Menggunakan kerangka Klijn dan Koppenjan, penelitian ini menekankan pentingnya hubungan antaraktor serta ketergantungan sumber daya (*interdependency*) dalam mencapai tujuan bersama. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jaringan kerja sama dan saling ketergantungan antaraktor menjadi elemen kunci dalam mendorong keberhasilan suatu program pembangunan, sehingga relevan sebagai rujukan teoritis dalam penelitian ini untuk memahami interdependensi aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh.<sup>33</sup>

Memasuki konteks pertanian, penelitian oleh Hijri, et al. (2021) terkait analisis respons kebijakan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketersediaan pangan menggunakan perspektif *network governance* Keith G. Provan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola jaringan antarinstansi telah berjalan relatif baik, namun memiliki sejumlah kendala, seperti kualitas beras yang didistribusikan serta keterbatasan kapasitas daerah akibat tidak

---

<sup>32</sup> Sry Devi, Laode Asrun Azis R, and Isra Djabbar, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Risky Shinta Rossilawati, Retna Hanani, and Kismartini, "Network Governance Dalam Peningkatan IPM Perempuan Di Kabupaten Wonogiri" (Universitas Diponegoro, 2024), hlm 22.

tersedianya Cadangan Beras Pemerintah Kota. Penelitian tersebut menjadi rujukan bagi penelitian ini dalam memahami bagaimana pola kerja sama, pembagian peran, dan keterbatasan sumber daya antaraktor memengaruhi efektivitas *network governance*, khususnya sebagai pembanding dalam melihat dinamika jaringan pada sektor produksi pertanian di tingkat hulu.<sup>34</sup>

Penelitian Dewi dkk. (2023) menyoroti relasi pertukaran sosial antara petani bawang merah dan tengkulak di Kabupaten Nganjuk yang ditandai oleh adanya ketergantungan, kepemilikan sumber daya, serta kemampuan negosiasi antaraktor. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa interdependensi antaraktor tidak hanya dibangun melalui pertukaran sumber daya material seperti komoditas dan uang, tetapi juga melalui sumber daya non-material berupa kepercayaan, relasi sosial, dan peran aktor kunci sebagai mediator.<sup>35</sup> Penelitian tersebut relevan dengan kajian interdependensi aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh karena sama-sama menekankan pentingnya hubungan saling ketergantungan, distribusi sumber daya, serta peran aktor dalam membentuk dinamika kerja sama dalam sektor pertanian.

Penelitian Agustian dkk. (2023) menunjukkan bahwa *network governance* berperan penting dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui interaksi dan ketergantungan antar berbagai aktor, seperti dinas teknis dan lembaga terkait, terutama dalam hal pertukaran sumber daya, berbagi informasi, dan kepercayaan. Temuan ini relevan dengan penelitian tentang interdependensi aktor

---

<sup>34</sup> Hijri et al., *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Clara Hosana Yessica Jelita Dewi et al., "Relasi Pertukaran Sosial : Petani Bawang Merah Dan Tengkulak Di Nganjuk Jawa Timur," *Psychopreneur Journal* 7, no. 1 (2023): 58–78.

dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh karena sama-sama menegaskan bahwa keberhasilan proses produksi dan kebijakan pangan tidak dapat bergantung pada satu aktor saja, melainkan membutuhkan hubungan saling ketergantungan antaraktor dalam memobilisasi sumber daya, menyelesaikan masalah lapangan, dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian.<sup>36</sup>

Dari dunia internasional, penelitian yang dilakukan oleh Meng, Chen, dan Wu (2019) menggunakan pendekatan *network governance* dan analisis jejaring kebijakan dalam menyoroiti bagaimana implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberagaman, posisi, serta pola interaksi dan koordinasi antar aktor atau lembaga lintas level pemerintahan yang terlibat dalam skema *campaign-style enforcement*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jejaring kebijakan melibatkan banyak aktor, terdapat ketimpangan peran dan dominasi aktor tertentu yang berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.<sup>37</sup> Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan jejaring aktor sebagai fokus analisis dalam memahami proses implementasi kebijakan, khususnya dalam melihat peran dan hubungan antaraktor.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Nagel dan Bravo-Laguna (2022) menganalisis dinamika *multi-level governance* melalui pendekatan *discourse network analysis* pada perdebatan regulasi polusi udara di Jerman menjadi studi pendahulu dalam penelitian ini. Studi tersebut menunjukkan bahwa proses

---

<sup>36</sup> Dimas Agustian et al., "Network Governance dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan," *Jurnal Kebijakan PUblik* 14, no. 1 (2023): 63–70.

<sup>37</sup> Fanrong Meng and Zitao Chen, "How Are Anti-Air Pollution Policies Implemented ? A Network Analysis of Campaign-Style Enforcement in China," *Sustainability* 11, no. 340 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.3390/su11020340>.

kebijakan publik tidak berjalan secara hierarkis, melainkan terbentuk melalui interaksi kompleks antar aktor lintas tingkat pemerintahan yang membawa kepentingan, narasi, dan kerangka pemikiran (*frames*) yang berbeda-beda. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan kebijakan sebagai hasil dari jejaring aktor yang saling berinteraksi.<sup>38</sup>

## **1.6.2. Administrasi Publik**

### **1.6.2.1. Definisi Administrasi Publik**

Istilah administrasi dapat ditelusuri menurut pendapat Donovan dan Jackson yang mengemukakan bahwa istilah tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Tugas-tugas administrasi meliputi identifikasi kebutuhan, redefinisi serta interpretasi tujuan organisasi, pengamanan sumber daya, pengembangan struktur dan prosedur kerja, penggunaan kepemimpinan dalam penyusunan kebijakan dan operasional, serta evaluasi berkelanjutan. Pemahaman ini membantah anggapan sempit bahwa administrasi hanya sebatas pekerjaan teknis seperti pengarsipan atau pelaporan.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, istilah administrasi publik mulai dikenal secara formal pada akhir abad ke-19 melalui tulisan Woodrow Wilson yang berjudul “*The Study of Administration*” yang diterbitkan pada tahun 1887. Tulisan ini menjadikan Wilson sebagai tokoh yang dianggap sebagai bapak administrasi publik di Amerika Serikat dengan mengemukakan bahwa tujuan dari studi administrasi adalah untuk

---

<sup>38</sup> Melanie Nagel and Carlos Bravo Laguna, “Analyzing Multi - Level Governance Dynamics from a Discourse Network Perspective : The Debate over Air Pollution Regulation in Germany,” *Environmental Sciences Europe* 34, no. 62 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00640-0>.

<sup>39</sup> Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm 2-3.

menemukan, apa saja yang dapat dan patut dilakukan oleh pemerintah secara tepat dan berhasil, serta bagaimana pemerintah dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan efisien, baik dari segi uang maupun energi. Dengan demikian, menurut Wilson, studi tentang administrasi publik memiliki dimensi normatif dan praktis yang berfokus pada efisiensi pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>40</sup>

### **1.6.2.2. Paradigma Administrasi Publik**

Setelah memahami kompleksitas definisi dan batasan dalam administrasi publik, penting untuk menelusuri bagaimana perkembangan disiplin ini turut dipengaruhi oleh perubahan paradigma keilmuan yang melatarbelakanginya. Paradigma sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat cara pandang, nilai-nilai, prinsip dasar, metode, serta pendekatan dalam memecahkan masalah yang dianut oleh suatu komunitas ilmiah pada periode tertentu. Dalam perjalanan sejarahnya, administrasi publik mengalami beberapa pergeseran paradigma sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Henry, yang membagi evolusi pemikiran administrasi publik ke dalam lima paradigma utama sebagai berikut.

#### 1) Paradigma I (1900–1926): Dikotomi Politik dan Administrasi

Paradigma ini menekankan pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi. Fungsi legislatif dipandang sebagai representasi kehendak rakyat, sementara eksekutif bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut, kemudian peran yudikatif adalah membantu legislative menetapkan arah kebijakan. Implikasi utama paradigma ini adalah administrasi harus dipahami

---

<sup>40</sup> Ayi Karyana, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dalam Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), hlm 6.

sebagai aktivitas yang bebas dari nilai (*value-free*). Namun demikian, paradigma ini hanya menyoroti aspek locus (yakni birokrasi pemerintahan), tanpa menjelaskan secara rinci metode atau pendekatan (*focus*) yang relevan untuk dikembangkan dalam administrasi publik.

2) Paradigma II (1927–1937): Prinsip-Prinsip Administrasi

Paradigma ini berfokus pada prinsip-prinsip universal dalam administrasi yang dirumuskan melalui akronim *POSDCORB* (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Prinsip-prinsip tersebut diyakini dapat diterapkan secara umum di berbagai konteks administrasi, baik publik maupun privat. Namun demikian, paradigma ini tidak menguraikan secara jelas mengenai *locus* dari administrasi publik, sebab perhatian utama lebih diberikan pada generalisasi prinsip-prinsip tersebut daripada pada konteks penerapannya.

3) Paradigma III (1950–1970): Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik

Dalam paradigma ini, administrasi publik dipahami sebagai disiplin dengan pengaruh politik dan kepentingan tertentu. Administrasi publik diposisikan sebagai bagian dari ilmu politik dengan *locus* pada birokrasi pemerintahan. Namun, fokus dalam paradigma ini menjadi kabur akibat kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi yang ada. Pada periode ini pula, administrasi publik mengalami krisis identitas karena dominasi pendekatan ilmu politik dalam pengkajiannya.

4) Paradigma IV (1956–1970): Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi

Paradigma ini berupaya mengembangkan prinsip-prinsip manajemen secara ilmiah dan lebih mendalam. Fokus paradigma masa ini mencakup perilaku organisasi, analisis manajemen, penggunaan metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasional. Dua arah perkembangan utama kemudian muncul, pertama, administrasi sebagai ilmu murni yang berkembang dengan dukungan dari disiplin psikologi sosial; kedua, orientasi pada kebijakan publik. Prinsip-prinsip yang dikembangkan kemudian diyakini dapat diimplementasikan baik di sektor swasta maupun sektor publik. Namun, lokus dari administrasi publik pada masa ini justru menjadi tidak jelas karena cakupan aplikasinya yang terlalu luas.

5) Paradigma V (1970–sekarang): Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Paradigma ini merupakan bentuk terbaru dari pendekatan terhadap administrasi publik, yang telah memiliki fokus dan lokus yang lebih jelas. Fokus dalam paradigma ini mencakup teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah persoalan dan kepentingan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berkuat pada aspek prosedural, melainkan juga pada isu-isu substantif yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Keban, *Op.Cit.*, hlm. 35–38.

6) *Governance*

Paradigma terakhir ini didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan oleh pemimpin politik demi kesejahteraan warga negara. Istilah *governance* digunakan untuk menggambarkan proses proses politik yang lebih inklusif, di mana kelompok masyarakat turut terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik. Pada intinya, *governance* melibatkan pola kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang mencakup partisipasi penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik, serta sektor swasta.<sup>42</sup> Selanjutnya, Osborne menjelaskan bahwa paradigma *New Public Governance* mencakup lima bentuk tata kelola yang saling berkaitan, yaitu:

a) *Socio-political governance*

Dimensi ini menekankan pola relasi antar institusi dalam kehidupan sosial. Kooiman (1999) menegaskan bahwa proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari interaksi dan komunikasi antaraktor dalam masyarakat, sehingga peran pemerintah tidak lagi bersifat dominan, melainkan berjalan berdampingan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat.

b) *Public policy governance*

Dimensi ini berfokus pada proses pengambilan kebijakan secara kolaboratif melalui jejaring kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan publik dipahami sebagai hasil kerja bersama berbagai aktor yang terlibat, baik pada tahap perumusan maupun implementasi kebijakan.

---

<sup>42</sup> Astuti et al., *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

c) *Administrative governance*

Dimensi ini berkaitan dengan kapasitas dan kinerja administrasi publik dalam merespons serta menyelesaikan persoalan publik yang semakin kompleks. Dimensi ini menyoroti sejauh mana sistem administrasi mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam tata kelola pemerintahan.

d) *Contract governance*

Dimensi ini muncul seiring meningkatnya kompleksitas urusan publik dan berkembangnya pendekatan *New Public Management*. Dalam dimensi ini, hubungan kontraktual antara penyelenggara layanan publik dan pihak penerima layanan menjadi penting untuk memperjelas pembagian peran, tanggung jawab, serta kesepakatan tujuan dalam proses governance.

e) *Network Governance*

Dimensi ini menekankan kerja sama lintas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik antar lembaga pemerintah maupun antara pemerintah dengan aktor non-pemerintah. Dengan demikian, *network governance* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkret dari perkembangan paradigma *New Public Governance* yang menempatkan kolaborasi dan jejaring sebagai inti tata kelola publik modern.<sup>43</sup>

Penelitian ini menggunakan paradigma *governance* untuk menganalisis proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan proses produksi tidak semata

---

<sup>43</sup> Rossilawati, Hanani, and Kismartini, *Loc. Cit.*

ditentukan oleh intervensi pemerintah, melainkan oleh hubungan dan ketergantungan antaraktor yang terlibat, seperti dinas teknis pertanian, pemerintah kecamatan dan desa, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta aktor pendukung lainnya. Melalui perspektif ini, penelitian menelaah sejauh mana hubungan saling ketergantungan antaraktor memengaruhi kelancaran proses produksi cabai, khususnya pada tahap penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, dan pengambilan keputusan di lapangan.

### **1.6.3. Manajemen Publik**

Manajemen publik merupakan bagian dari rumpun keilmuan administrasi publik yang secara khusus mempelajari bagaimana organisasi sektor publik dikelola agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus kajian manajemen publik mencakup perancangan dan pelaksanaan program, penataan dan penguatan organisasi, pengelolaan sumber daya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga evaluasi program dan pelaksanaan audit.<sup>44</sup>

Pemahaman mengenai manajemen publik dapat ditinjau dari berbagai pandangan para ahli. McKevitt dan Lawton (1994) mendefinisikan manajemen publik sebagai kajian yang bersifat interdisipliner terhadap aspek-aspek umum organisasi, yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dengan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, informasi, aset fisik, serta sumber daya politik.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Andy Feefta Wijaya and Oscar Radyan Dinar, *Manajemen Publik: Teori Dan Praktik* (Malang: Universitas Brawiyaya Press, 2014), hlm 1.

<sup>45</sup> Eko Sudarmanto et al., *Manajemen Sektor Publik* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 2.

Sementara itu, Hughes (1994) memandang manajemen publik bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan proses pengelolaan organisasi publik untuk mencapai tujuan secara efisien dengan orientasi yang kuat pada hasil dengan menekankan akuntabilitas.<sup>46</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, Iwan Satibi (2012) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan konsep dan praktik pengelolaan yang dilakukan oleh institusi publik, khususnya pemerintah, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi, dan evaluasi terhadap berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi, maupun sumber daya lainnya guna mencapai tujuan organisasi publik.<sup>47</sup>

Selanjutnya, manajemen publik dalam kacamata administrasi publik telah mengalami pergeseran paradigma, mulai dari *Old Public Administration (OPA)* yang menggambarkan pemerintahan yang kaku, sentralistik, dan tertutup dimana peran administrator publik fokus pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial klasik seperti *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting*, dan *budgeting (POSDCORB)*. Paradigma ini kemudian bergeser ke *New Public Management (NPM)* yang mendorong penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik.<sup>48</sup>

Selanjutnya, muncul paradigma *New Public Service (NPS)* yang mengkritik pendekatan tersebut dengan menekankan nilai-nilai kemasyarakatan, di mana organisasi publik diarahkan untuk melayani warga negara, bukan sekadar

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Dr. Iwan Satibi, M. Si. *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik* (Bandung: Unpas Press, 2012), hlm 15.

<sup>48</sup> Andy Feefta Wijaya and Oscar Radyan Danar, *Op. Cit.*, hlm 7-11.

mengelola organisasi layaknya entitas bisnis. Perkembangan terbaru dikenal sebagai *New Public Governance*, yang menegaskan bahwa manajemen publik tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan internal organisasi, tetapi juga pada kemampuan membangun dan mengelola hubungan antarorganisasi, termasuk kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan publik.<sup>49</sup>

#### **1.6.4. Network Governance**

Perkembangan konsep *governance* melahirkan berbagai pendekatan baru dalam memahami tata kelola publik, salah satunya adalah *network governance*. Pendekatan ini menekankan bahwa proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan tidak lagi didominasi oleh satu aktor tunggal, melainkan melibatkan berbagai aktor yang saling terhubung dan saling bergantung (*interdependent*).<sup>50</sup> Konsep *network governance* pertama kali diperkenalkan oleh Keith G. Provan dan Patrick Kenis, yang menyoroti pentingnya interaksi antar peserta dalam urusan pemerintahan melalui jaringan kerja sama yang melibatkan institusi dan struktur berwenang dalam pengalokasian sumber daya. Pendekatan ini memandang tata kelola jaringan sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor, yang melibatkan aktor pemerintah, swasta, serta organisasi masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai aktor tersebut, *network governance* memungkinkan terciptanya tata kelola yang fleksibel, adaptif, dan partisipatif dalam menangani permasalahan publik.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Amy Y. S. Rahayu and Krisna Puji Rahmayanti, *Pengantar Manajemen Sektor Publik* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

<sup>50</sup> Ismail Al-Jamily, "NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR" (Universitas Hasanuddin, 2024), hlm 34.

<sup>51</sup> Risky Shinta Rossilawati, Retna Hanani, and Kismartini, *Op.Cit.*, hlm 22.

Sejalan dengan itu, De Francesco, et al. mendefinisikan *network governance* sebagai aktivitas bersama antara entitas pemerintah dan aktor non-negara yang dibangun melalui mekanisme jejaring, baik berbasis kontrak maupun non-kontrak, serta diikat oleh aturan formal yang disepakati.<sup>52</sup> Sementara itu, Marsh dan Rhodes (2006) memandang jaringan pemerintahan sebagai bentuk pengorganisasian mandiri (*self-organizing*) yang melibatkan hubungan antarorganisasi, dengan karakter hubungan yang kompleks serta ditentukan oleh peran dan fungsi sosial masing-masing institusi.<sup>53</sup>

Provan dan Kenis (2008) selanjutnya mengklasifikasikan tata kelola jaringan ke dalam tiga bentuk utama.

- 1) *Participant-governed network*, yaitu jaringan yang dikelola langsung oleh para anggotanya tanpa adanya entitas pengelola khusus. Pengaturan dalam bentuk ini dapat bersifat formal melalui pertemuan rutin atau informal melalui interaksi yang tidak terkoordinasi secara terpusat.
- 2) *Lead organization-governed network*, yakni jaringan yang dikoordinasikan oleh satu organisasi utama yang berperan sebagai pemimpin, sehingga pengambilan keputusan cenderung terpusat.
- 3) *Network administrative organization (NAO)*, yaitu jaringan yang dikelola oleh entitas administrasi khusus yang dibentuk untuk mengatur dan mengoordinasikan aktivitas jaringan, meskipun anggota jaringan tetap saling berinteraksi secara langsung.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Khalishaa, et al., *Op. Cit.*, hlm 312.

<sup>53</sup> Ismail Al-Jamily, *Op. Cit.*, hlm 33.

<sup>54</sup> Ismail Al-Jamily, *Op. Cit.*, hlm 36-38.

Perkembangan teori *network governance* kemudian disempurnakan oleh Klijn dan Koppenjan (2016), yang memandang jaringan kebijakan sebagai wadah interaksi strategis antaraktor dalam menghasilkan suatu solusi, kebijakan, maupun layanan publik.<sup>55</sup> Lebih lanjut, *network governance* merupakan strategi yang memengaruhi proses interaksi dan pengambilan keputusan dalam menjawab permasalahan publik yang kompleks.<sup>56</sup> Klijn dan Koppenjan (2016) mengemukakan empat dimensi utama dalam menganalisis *network governance*.

1) *Actors, Interdependency, and Frames*

Dimensi ini menekankan bahwa jaringan terdiri dari aktor-aktor yang beragam dengan tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda. Meskipun setiap aktor menjalankan perannya masing-masing, mereka tetap saling bergantung melalui pertukaran sumber daya guna mencapai tujuan bersama.

2) *Network Management*

Dimensi ini merupakan suatu bentuk upaya mengelola interaksi dan pertukaran sumber daya dalam jaringan agar kolaborasi dapat berjalan efektif, termasuk melalui fasilitasi dialog, negosiasi, dan koordinasi antaraktor.

3) *Institutional Features*

Dimensi ini merujuk pada aturan, norma, dan regulasi yang mengatur perilaku aktor serta batasan dalam pertukaran sumber daya di dalam jaringan. Aturan ini dapat bersumber dari kesepakatan internal jaringan maupun dari

---

<sup>55</sup> Artonang, et al., *Op. Cit.*, hlm 363.

<sup>56</sup> Rossilawati, et al., *Op. Cit.* hlm 23.

regulasi yang lebih tinggi, sehingga menjaga agar aktivitas jaringan tetap berada pada jalur tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4) *Interactions and complexity*

Dimensi ini menegaskan bahwa hubungan saling ketergantungan antaraktor akan melahirkan interaksi yang kompleks dan pola negosiasi dalam penyelesaian masalah. Dalam perspektif ini, kebijakan atau program dipahami sebagai hasil interaksi banyak aktor, bukan tindakan dari satu pihak saja.<sup>57</sup>

Dinamika konsep ini dapat dipahami melalui analisis terhadap faktor yang memengaruhi keberjalanan jaringan. Berdasarkan pemikiran pratikno, dkk. (2007) mengenai interdependensi, pertukaran sumber daya, dan struktur jaringan, dapat ditarik pemahaman bahwa keberlangsungan suatu *network* dipengaruhi oleh beberapa kondisi pendukung, antara lain:

##### 1. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif dalam suatu jaringan merujuk pada kemampuan antaraktor untuk saling memahami pesan masing-masing, sehingga interaksi yang terjadi dapat menghasilkan respons yang selaras dengan tujuan bersama. Dalam tata kelola jaringan, komunikasi menjadi fondasi awal terbentuknya hubungan antaraktor, karena melalui komunikasi inilah proses interaksi, pertukaran informasi, serta penyelarasan kepentingan mulai terbangun. Tanpa komunikasi yang efektif, hubungan antaraktor cenderung bersifat terputus-putus dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, yang pada akhirnya menghambat terbentuknya jaringan kerja yang efektif.

---

<sup>57</sup> Sry Devi, Laode Asrun Azis R, and Isra Djabbar, *Op. Cit.*, hlm 19.

## 2. Kejelasan Kelembagaan

Setelah jaringan terbentuk, keberlanjutannya sangat ditentukan oleh adanya kelembagaan yang jelas. Kelembagaan dalam jaringan dimaknai sebagai pengaturan mengenai pembagian peran, kewenangan masing-masing aktor yang terlibat, termasuk mekanisme respons yang dapat dilakukan ketika terjadi ketimpangan kekuasaan maupun distribusi sumber daya antaraktor. Dengan kelembagaan yang tertata, interaksi dalam jaringan tidak berjalan secara sporadis, melainkan mengikuti pola dan aturan yang disepakati bersama

## 3. Kesadaran Aktor atas Ketergantungan Satu Sama Lain

Kesadaran aktor yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas adanya permasalahan bersama yang mendesak untuk diselesaikan, tetapi juga kesadaran akan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dari kesadaran inilah muncul kemauan untuk berbagi sumber daya, baik berupa informasi, kewenangan, maupun dukungan teknis. Proses berbagi sumber daya tersebut kemudian melahirkan hubungan saling ketergantungan (*interdependency*) antaraktor, yang menjadi ciri utama dari terbentuknya *network governance*.

## 4. Komitmen Aktor Kunci

Keberlangsungan tata kelola jaringan juga sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen dari aktor pemimpin atau aktor kunci dalam jaringan. Komitmen ini berperan dalam menjaga kesinambungan kerja sama, terutama ketika jaringan

menghadapi hambatan atau konflik kepentingan. Komitmen tersebut dapat muncul karena dua hal, yaitu keterikatan terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan jaringan atau dorongan kesadaran internal pemimpin terhadap pentingnya keberlanjutan kerja sama antaraktor.

*Network Governance* dalam penelitian ini dipahami secara spesifik melalui dimensi *actor, interdependency, and frames*, yaitu bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam proses produksi komoditas cabai saling bergantung satu sama lain dalam menjalankan perannya. Kacamata teori ini diharapkan mampu menjelaskan terkait kemungkinan adanya ketidakseimbangan interdependensi tersebut.

#### **1.6.5. Proses Produksi Komoditas Cabai**

Cabai (*Capsicum annuum L.*) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi.<sup>58</sup> Tingginya nilai ekonomi tersebut menjadikan cabai sebagai komoditas strategis, namun sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan keuntungan bagi petani.<sup>59</sup> Dalam bidang pertanian, proses produksi dipahami sebagai rangkaian tahapan yang dilakukan untuk mengubah berbagai input, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi, menjadi output berupa hasil pertanian.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> S.P Kusmea Dinata et al., *Budidaya, Produksi Benih Dan Pascapanen Cabai* (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021), hlm 1.

<sup>59</sup> Aylee Ch. A. Sheyoputri, Andi Muhibuddin, and Apiaty Kamaluddin, *Manajemen Produksi Pertanian* (Bengkulu: Qianzy Sains Indonesia, 2025), hlm 79.

<sup>60</sup> Nindy Sevirasari, Cahyo Adileksana, and Ananta Bayu Pratama, *Modul Pembelajaran Praktik Pertanian Terbaik Budi Daya Cabai Merah* (Jakarta Selatan: Yayasan Edufarmers International, 2023), hlm 2.

Proses produksi tanaman pada umumnya mengacu pada petunjuk teknis budidaya yang bertujuan menghasilkan panen dalam jumlah optimal dan berkualitas.<sup>61</sup> Teknik budidaya pada tanaman cabai meliputi tahap pengolahan lahan, persiapan benih, penyemaian, penanaman, pemeliharaan (penyiraman dan pengairan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemangkasan, serta rotasi tanaman), hingga pemanenan.<sup>62</sup> Dalam proses produksi tersebut terdapat unsur penting yang menjadi penunjang kebutuhan produksi yang disebut dengan faktor produksi. Dalam pertanian, faktor produksi meliputi lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen.<sup>63</sup> Menurut Soekartawi (1994), faktor-faktor yang memengaruhi produksi pertanian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Faktor biologis, seperti kondisi dan kesuburan lahan, benih atau varietas tanaman, pupuk, obat-obatan, serta gulma.
2. Faktor sosial-ekonomi, meliputi biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pendapatan petani, risiko dan ketidakpastian, kelembagaan, serta ketersediaan akses kredit.<sup>64</sup>

Selanjutnya, manajemen produksi pertanian memegang peranan penting dalam menjaga dan mengoptimalkan penggunaan faktor produksi melalui perencanaan produksi yang matang, pengelolaan sumber daya secara efisien, pengendalian kualitas sesuai standar pasar, pengelolaan risiko produksi, penerapan prinsip

---

<sup>61</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations, *Budidaya Cabai Yang Baik Dan Benar (Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan, Dan Pemanenan Tanaman Cabai)*, 1st ed. (FAO Indonesia, 2013), <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/be829id>, hlm 1.

<sup>62</sup> Sheyoputri, et al., *Op. Cit.*, hlm 35.

<sup>63</sup> Prof. Dr. Ir. Lies Sulistyowati, M.S., et al., *Op. Cit.*, hlm 54-59.

<sup>64</sup> Prof. Dr. Ir. Lies Sulistyowati, M.S., et al., *Op. Cit.*, hlm 32.

pertanian berkelanjutan, serta upaya peningkatan kesejahteraan petani.<sup>65</sup> Dalam melakukan manajemen proses produksi ini, petani cabai di Kecamatan Kumpeh perlu dukungan aktor lain, utamanya dari aktor kunci yaitu otoritas daerah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi menyatakan komitmennya dalam mendukung produktivitas komoditas pertanian melalui dokumen perencanaan dalam melaksanakan program-program berikut.

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; serta
4. Program penyuluhan pertanian.

Melalui program-program tersebut, DTPH mengintervensi proses produksi cabai mulai dari tahap pengolahan lahan hingga pemanenan, melalui pemberian bantuan sarana produksi, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan, serta penyediaan prasarana produksi, seperti irigasi, jalan usaha tani (JUT), dan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung pemanfaatan teknologi oleh petani. Selain itu, DTPH juga menugaskan penyuluh pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan teknis, melakukan penyuluhan, serta menyalurkan dan menyampaikan keluhan petani terkait permasalahan produksi.

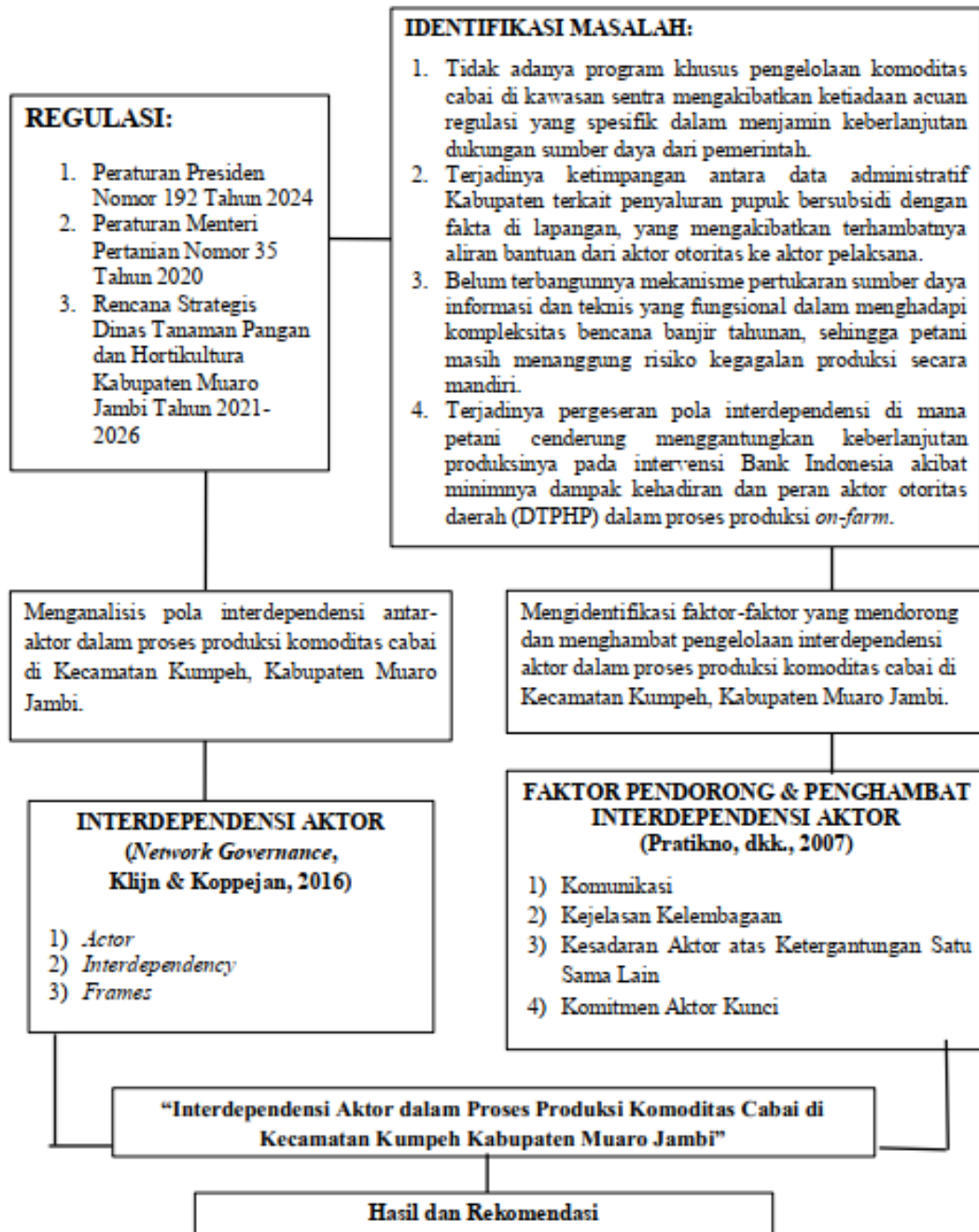
Namun demikian, dalam praktiknya, dukungan DTPH dalam proses produksi cabai di Kecamatan Kumpeh belum berjalan secara optimal. Keterbatasan intervensi tersebut kemudian memunculkan keterlibatan aktor lain di luar struktur formal pemerintah daerah. Salah satu aktor yang muncul adalah Bank Indonesia, yang

---

<sup>65</sup> Sheyoputri, et al., *Op. Cit.*, hlm 4.

secara langsung melakukan intervensi kepada petani dengan memberikan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian yang mendukung proses produksi cabai, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir produksi. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika keterlibatan aktor dan hubungan ketergantungan antaraktor dalam proses produksi cabai di Kecamatan Kumpeh, yang menjadi konteks penting dalam analisis interdependensi aktor pada penelitian ini.

## 1.7.Operasionalisasi Konsep



Gambar 1.5. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Peneliti, 2025

Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari persoalan proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang dioperasionalkan sebagai tahap budidaya cabai mulai dari persiapan,

penanaman, hingga panen. Sebagai daerah sentra produksi cabai di tingkat kabupaten, Desa Maju Jaya dan Desa Mekar Sari seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam mengelola komoditas tersebut. Dalam pelaksanaannya, proses tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga kelompok tani, penyuluh pertanian, serta aktor lain yang saling berinteraksi. Namun, hubungan pertukaran sumber daya antaraktor tersebut belum berjalan optimal, terlihat dari pasifnya peran otoritas daerah dalam menyuplai kebutuhan produksi, sehingga para petani secara pragmatis mengalihkan ketergantungannya kepada Bank Indonesia yang dinilai lebih responsif dalam memberikan dukungan dan kepastian input produksi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis fenomena ketergantungan yang tidak terkelola dengan baik sekaligus mengidentifikasi faktor yang mendorong dan menghambat keseimbangan peran dalam pertukaran sumber daya tersebut.

Analisis fenomena ketergantungan dan pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh menggunakan dimensi *actor*, *interdependency*, and *frames* dalam kerangka teori *network governance* dari Klijn dan Koppenjan (2016). Pada dimensi tersebut Klijn dan Koppejan menjelaskan bahwa setiap aktor memiliki peran dan sumber daya yang berbeda, namun dalam pencapaian tujuan bersama para aktor akan saling bertukar sumber daya yang kemudian membangun hubungan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Kacamata teori yang terdiri atas dimensi *actors*, *interdependency*, and *frames* tersebut akan digunakan peneliti dalam melihat fenomena interdependensi aktor terkait sejauh mana hubungan ketergantungan

antar aktor dalam proses produksi terjalin. Selanjutnya, analisis dalam penelitian ini dioperasionalkan berdasarkan 3 (tiga) sub-fenomena berikut.

1. *Actors*

Sub-fenomena ini dioperasionalkan sebagai alat untuk mengidentifikasi siapa saja, apa saja sumber daya yang dimiliki, dan sejauh mana peran aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh. Sry Devi, Laode Asrun Azis R, & Isra Djabbar (2025) melihat sub-fenomena ini melalui:

- a. Keberagaman aktor yang terlibat
- b. Peran dan Kewenangan masing-masing aktor berdasarkan sumber daya yang dimiliki

2. *Interdependency*

Sub-fenomena ini akan menjelaskan bagaimana hubungan ketergantungan yang terjalin pada masing-masing aktor dalam proses produksi komoditas cabai, termasuk bagaimana aktor tersebut saling bertukar sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, sub-fenomena ini akan melihat kualitas hubungan ketergantungan tersebut berdasarkan persepsi manfaat yang dirasakan masing-masing aktor dan sejauh mana mereka merasakan keuntungan dari pertukaran sumber daya tersebut. Sub-fenomena ketergantungan ini dilihat melalui aspek yang dirujuk dari penelitian Khalishaa, dkk. (2025), yaitu:

- a. Ketergantungan masyarakat pada aktor eksternal
- b. Ketergantungan aktor eksternal pada masyarakat
- c. Kualitas interdependensi dan persepsi manfaat

### 3. *Frames*

Sub-fenomena ini dioperasionisasikan untuk meninjau sejauh mana para aktor menyadari kesamaan tujuannya, yaitu menjaga stabilitas proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh termasuk menganalisis cara mereka menghadapi persoalan produksi yang muncul. Pemahaman akan peran yang akan dijalani merupakan indikasi bahwa *frames* dalam interdependensi aktor sudah terbentuk. Dalam penelitiannya, Aritonang (2025) meninjau bentuk *frames* melalui aspek-aspek berikut.

- a. Kesamaan tujuan bersama
- b. Cara pandang terhadap masalah
- c. Kesepahaman peran

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai faktor pendukung dan penghambat hubungan ketergantungan dan pertukaran sumber daya antar aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh, penelitian ini menggunakan kerangka analisis faktor yang memengaruhi keberjalanan jaringan berdasarkan pemikiran Pratikno, dkk. (2007). Model ini memandang bahwa keberhasilan maupun kegagalan jaringan dipengaruhi oleh komunikasi, kelembagaan, kesadaran aktor, dan komitmen aktor kunci yang dioperasionisasikan sebagai berikut.

#### 1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dipandang sebagai proses pertukaran informasi dan interaksi antar aktor yang terjalin. Komunikasi yang berjalan baik menjadi faktor pendukung, karena memungkinkan pertukaran informasi dan penyelarasan

kepentingan. Komunikasi yang terputus atau satu arah menjadi faktor penghambat, karena aktor bekerja sendiri-sendiri tanpa kesadaran saling membutuhkan. Selanjutnya, faktor komunikasi ditinjau melalui aspek berikut.

- a. Intensitas komunikasi antar aktor
- b. Responsivitas aktor terhadap masalah dalam jaringan

## 2. Kejelasan Kelembagaan

Kelembagaan yang jelas memperkuat interdependensi fungsional, karena setiap aktor memahami posisi dan keterbatasannya, sementara ketidakjelasan peran menjadi penghambat, karena aktor cenderung saling menunggu atau justru berjalan sendiri. Selanjutnya, kejelasan kelembagaan dilihat melalui aspek berikut.

- a. Kejelasan tugas dan fungsi masing-masing aktor
- b. Mekanisme koordinasi saat terjadi masalah
- c. Ketimpangan kewenangan atau dominasi aktor tertentu

## 3. Kesadaran Aktor atas Ketergantungan Satu Sama Lain

Kesadaran saling membutuhkan menunjukkan interdependensi yang sehat dan saling menguatkan, sementara ketergantungan yang timpang (satu pihak bergantung penuh, pihak lain tidak) menjadi penghambat jaringan, karena tidak tercipta kepentingan bersama. Dalam melihat kesadaran tersebut analisis dilakukan terhadap aspek berikut.

- a. Pengakuan aktor terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki
- b. Kesiapan berbagi sumber daya
- c. Adanya hubungan timbal balik atau ketergantungan sepihak

#### 4. Komitmen Aktor Kunci

Komitmen aktor kunci menjadi penopang utama keberlanjutan hubungan interdependensi, terutama ketika jaringan menghadapi berbagai kendala dalam proses produksi. Lemahnya komitmen aktor kunci berpotensi menyebabkan hubungan antaraktor bersifat sementara, tidak berkelanjutan, dan mudah terputus. Dalam penelitian ini, aktor kunci yang diamati adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), sebab posisinya sebagai aktor pemerintah daerah yang memiliki kewenangan formal, tanggung jawab utama, serta kontinuitas peran dalam mendukung proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh. DTPH tidak hanya berperan dalam perencanaan dan fasilitasi program, tetapi juga menjadi penghubung utama antara petani, penyuluh, serta aktor pendukung lainnya. Komitmen aktor kunci dilihat melalui aspek-aspek berikut ini.

- a. Konsistensi keterlibatan aktor kunci dalam jaringan
- b. Tindak lanjut atas permasalahan yang muncul
- c. Inisiatif aktor kunci dalam kerja sama
- d. Dasar komitmen (regulasi atau kesadaran personal)

## 1.8. Fenomena Penelitian

**Tabel 1.5. Fenomena Penelitian**

Fenomena	Sub-Fenomena	Gejala
Interdependensi Aktor dalam pelaksanaan proses produksi komoditas cabai	<i>Actor</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi aktor yang terlibat dalam proses produksi</li> <li>b. Jenis sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor dalam mendukung proses produksi</li> </ul>
	<i>Interdependency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk ketergantungan petani kepada dinas, penyuluh, dan Bank Indonesia dalam proses produksi</li> <li>b. Bentuk ketergantungan dinas, penyuluh, dan Bank Indonesia terhadap petani dalam proses produksi</li> <li>c. Persepsi aktor terhadap manfaat yang diperoleh dari hubungan ketergantungan yang terbentuk dalam proses produksi</li> </ul>
	<i>Frames</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara aktor memahami tujuan bersama dalam menjaga keberlangsungan proses produksi</li> <li>b. Cara aktor memaknai dan merespons permasalahan produksi, seperti bencana pertanian atau kendala sarana produksi</li> <li>c. Pemahaman aktor terhadap peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam proses produksi komoditas cabai</li> </ul>
Faktor Pendukung dan Penghambat Jalannya Interdependensi Aktor dalam Pelaksanaan Proses Produksi Komoditas Cabai	Komunikasi yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komunikasi dua arah antara petani dengan aktor lain dalam proses produksi</li> <li>b. Adanya rapat, penyuluhan, ataupun group WhatsApp sebagai media komunikasi antaraktor</li> <li>c. Frekuensi forum koordinasi antaraktor dalam membahas permasalahan produksi</li> <li>d. Kecepatan respon aktor terhadap keluhan atau permasalahan yang dihadapi petani</li> </ul>

Fenomena	Sub-Fenomena	Gejala
	Kejelasan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya SOP yang menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing aktor</li> <li>b. Adanya mekanisme koordinasi dalam menghadapi masalah produksi</li> <li>c. Adanya dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi pembagian peran dalam proses produksi</li> </ul>
	Kesadaran Aktor atas Ketergantungan Satu Sama Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakuan aktor terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki</li> <li>b. Kesiediaan aktor berbagi sumber daya, baik informasi, teknis, dan lainnya</li> <li>c. Pola hubungan yang terbentuk, apakah bersifat timbal balik atau menunjukkan ketergantungan sepihak</li> </ul>
	Komitmen Aktor Kunci	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsistensi keterlibatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) dalam mendukung proses produksi cabai</li> <li>b. Tindak lanjut DTPH atas permasalahan produksi</li> <li>c. Inisiatif DTPH dalam menjalin kerjasama dengan aktor lain</li> <li>d. Dasar komitmen DTPH baik yang bersumber dari regulasi maupun praktik di lapangan</li> </ul>

*Sumber: Peneliti, 2025*

### 1.9. Argumen Penelitian

Proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi masih menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada ketidakstabilan produksi dan kesejahteraan petani. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis budidaya, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola jaringan. Terjadi diskoneksi sumber daya antara pemerintah daerah, petani, dan

aktor pendukung, di mana mandate regulasi belum berjalan linear dengan kondisi di lapangan. Hal ini menandakan adanya hambatan dalam hubungan saling ketergantungan yang seharusnya dapat mendukung proses produksi.

Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa pendekatan *Network Governance* adalah kacamata yang paling tepat untuk membedah masalah ini, namun dengan fokus spesifik pada dimensi Interdependensi Aktor. Pendekatan ini tidak hanya melihat siapa yang terlibat, tetapi membongkar mengapa terjadi pergeseran ketergantungan petani dari pemerintah daerah ke aktor eksternal (Bank Indonesia). Dengan membedah interdependensi, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana ketimpangan sumber daya dan lemahnya komitmen aktor otoritas menjadi penghambat utama dalam proses produksi cabai.

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih banyak mengevaluasi kebijakan secara umum, penelitian ini memberikan analisis mendalam pada level manajemen jaringan di tingkat lokal. Argumen utamanya adalah bahwa proses produksi cabai di Kumpeh tidak akan pernah optimal selama manajemen interdependensi antar-aktor masih bersifat asimetris dan tidak memiliki landasan kelembagaan yang kuat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi nyata bagi perbaikan tata kelola kolaboratif di Kabupaten Muaro Jambi.

## **1.10. Metode Penelitian**

### **1.10.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana hubungan ketergantungan antar aktor dan faktor penghambatnya dalam proses produksi

komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan gambaran komprehensif mengenai mekanisme pertukaran sumber daya dan asimetri ketergantungan yang terjadi antar-aktor, serta bagaimana dinamika tersebut berimplikasi pada keberlanjutan proses produksi cabai di Kecamatan Kumpeh.

### **1.10.2. Situs Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Wilayah ini dipilih karena menjadi sentra produksi cabai di Muaro Jambi, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam proses produksinya. Pemilihan situs ini didasarkan pada fenomena lemahnya pengelolaan interdependensi antar-aktor dalam mendukung keberlangsungan proses produksi, yang terlihat dari adanya diskoneksi antara mandat kebijakan pemerintah daerah dengan realitas pemenuhan kebutuhan sarana produksi bagi petani di lapangan.

### **1.10.3. Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan sebagai subjek penelitian, karena peneliti telah mengetahui pihak-pihak yang paling relevan serta memiliki pengetahuan mendalam terkait proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh. Dengan demikian, informan ditetapkan berdasarkan kriteria berikut, yaitu: (1) memiliki peran strategis dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan, (2) terlibat langsung dalam kegiatan produksi cabai, dan (3) memahami kondisi faktual di lapangan. Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, sebagai pemilik sumber daya otoritas dan anggaran daerah;
2. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kumpeh, sebagai jembatan komunikasi dan pertukaran sumber daya teknis antara pemerintah dan petani;
3. Pemerintah Desa Maju Jaya dan Mekarsari, sebagai fasilitator akses sumber daya lahan dan koordinasi lokal;
4. Gabungan Kelompok tani dan Kelompok Tani setempat yang terlibat langsung dalam hubungan dengan aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah, sebagai pelaksana proses produksi komoditas cabai;
5. Koordinator Program Bank Indonesia Perwakilan Jambi Wilayah Kecamatan Kumpeh, selaku aktor pendukung strategis yang menyediakan sumber daya finansial dan teknologi di luar kerangka pemerintah daerah.

Pemilihan informan dilakukan hingga dianggap mampu memberikan data yang memadai untuk mencapai saturasi data (kejenuhan data), yaitu kondisi di mana tidak lagi ditemukan informasi baru atau tambahan yang signifikan dari informan selanjutnya, sehingga data yang dikumpulkan telah mampu menjawab rumusan masalah secara mendalam dan komprehensif.

#### **1.10.4. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan. Data kuantitatif digunakan sebagai data pendukung dalam penulisan latar belakang, meliputi informasi numerik seperti luas lahan pertanian, tingkat produksi dan produktivitas cabai, jumlah kelompok tani aktif, serta data curah hujan dan

frekuensi banjir yang memengaruhi lahan pertanian di Kecamatan Kumpeh. Data tersebut diperoleh dari dokumen resmi instansi terkait, seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya data kualitatif sebagai data yang akan digunakan dalam pembahasan hasil penelitian metode wawancara, observasi, dan dokumen.

#### **1.10.5. Sumber Data**

Penelitian ini mengkaji 2 sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara sekaligus observasi langsung kepada informan penelitian. Selanjutnya, terkait data sekunder dihimpun dari beragam sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang memuat kajian tentang implementasi pengembangan komoditas hortikultura khususnya tanaman cabai yang mencakup :

- a. Dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025–2029;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;
- d. Situs resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id));
- e. Situs berita lokal Jambi terkait kondisi existing kebijakan pengembangan cabai di wilayah Jambi.

#### **1.10.6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap orientasi (pra-penelitian) untuk melakukan

identifikasi masalah, hingga tahap eksplorasi saat penelitian berlangsung. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara terus terang dan tidak terstruktur. Peneliti menyatakan statusnya secara terbuka kepada informan, namun proses pengamatan tidak dibatasi oleh aturan baku agar peneliti dapat menangkap dinamika lapangan secara fleksibel. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lahan, aktivitas petani, serta pola interaksi aktor yang bersifat dinamis.
2. Wawancara Semi-Terstruktur (*Semi-Structured Interview*), dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi poin-poin pertanyaan pokok, namun tetap membuka ruang bagi peneliti untuk melakukan improvisasi dan pendalaman sesuai dengan respon informan. Teknik ini diterapkan kepada informan kunci (*key informants*) yang terlibat langsung dalam jaringan produksi, meliputi pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Bank Indonesia (BI), penyuluh pertanian, serta petani cabai di lokasi penelitian.
3. Dokumentasi, digunakan untuk menghimpun data pendukung baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun rekaman. Dokumen yang dikumpulkan meliputi data sekunder seperti Rencana Strategis (Renstra) dinas dan data realisasi bantuan, hingga foto-foto aktivitas di lapangan yang mencerminkan realitas proses produksi dan interdependensi antar-aktor.

#### **1.10.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung secara terus-menerus sejak awal

pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Penelitian ini mengadopsi pandangan Miles et al. mengenai tiga aktivitas parallel analisis data sebagai berikut.

1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, merangkum data wawancara, serta menyeleksi data yang berhubungan dengan indikator dimensi interdependensi aktor dan faktor-faktor pengaruhnya. Fokus reduksi diarahkan pada:

- a) Identifikasi aktor yang terlibat beserta peran dan kepentingannya,
- b) bentuk ketergantungan antar aktor (*interdependency*) dalam pertukaran sumber daya proses produksi cabai,
- c) persepsi dan cara pandang aktor terhadap tujuan bersama dan permasalahan produksi cabai,
- d) hambatan pelaksanaan jaringan aktor dalam proses produksi cabai.

2) Penyajian data (*data display*)

Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan jejaring, maupun hubungan antarkategori. Penyajian data ini digunakan untuk menggambarkan peta kekuatan aktor, ketimpangan sumber daya yang terjadi, serta bagaimana ketergantungan petani bergeser dari satu aktor ke aktor lainnya.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola ketergantungan yang ditemukan dalam mengelola interdependensi tersebut. Hasil akhir analisis diharapkan mampu menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pola

interdependensi aktor terbentuk dalam proses produksi cabai serta faktor-faktor pengaruh yang memengaruhi keberhasilannya.

#### **1.10.8. Kualitas Data**

Kualitas data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan teknik guna menjaga kredibilitas hasil analisis. Triangulasi sumber dilakukan dengan menyandingkan informasi dari pihak Dinas TPH, Bank Indonesia, dan petani untuk memverifikasi konsistensi data mengenai distribusi sumber daya serta pola ketergantungan yang terbentuk. Sementara itu, triangulasi teknik diterapkan dengan membenturkan hasil wawancara mendalam terhadap aktor terkait dengan observasi lapangan dan studi dokumen, seperti data realisasi pupuk dan rencana strategis dinas. Melalui prosedur ini, peneliti dapat menguji keabsahan klaim administratif pemerintah dengan fakta riil yang dialami petani di lapangan, sehingga diperoleh data yang objektif mengenai hambatan interdependensi dalam proses produksi cabai.